

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HIPOTEK KAPAL LAUT PADA PT BANK NEGARA INDONESIA

Industri perkapalan nasional sangat erat serta tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan suatu aspek pembiayaan. Pembiayaan untuk pengadaan kapal laut tersebut dapat diperoleh melalui fasilitas kredit atau pinjaman. Oleh karena fasilitas kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat, prinsip kerahasiaan, prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian bank sebelum menyalurkan fasilitas kreditnya harus berusaha untuk mengurangi risiko tersebut dengan mempunyai keyakinan atas itikad baik, kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk melunasi kewajibannya dalam pelunasan hutang dengan jaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan kapal laut sebagai objek jaminan hipotek dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis implementasi penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hipotek kapal laut pada PT. Bank Negara Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *social legal*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Analis Kredit PT. Bank BNI Kantor Wilayah Kota Mojokerto, Relationship Manager PT. Bank BNI Kantor Wilayah Boyolali. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian bahwa ketentuan-ketentuan mengenai kapal laut sebagai objek jaminan hipotek dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Maritime Liens and Mortgages*. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hipotek kapal laut di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) analisis pembiayaan dilakukan dengan cara menganalisis dengan pedoman *five c's* terhadap debitur atau calon debitur beserta usahanya, sesuai karakteristik usaha pelayaran beserta pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan peraturan di bidang pelayaran. Ditemukannya hambatan saat pengecekan pengaturan tentang hipotek kapal dirasa kurang memberikan kepastian hukum terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut, maka Pemerintah sebaiknya melakukan peninjauan kembali atas relevansi pengaturan Hipotek dan Hipotek atas Kapal Laut pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sesuai dengan perkembangan jaman

Kata Kunci: peraturan; hipotek; jaminan; kapal laut; prinsip kehati-hatian.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PRUDENCE IN THE PROVISION OF CREDIT WITH THE GUARANTEE OF SEA VESSEL MORTGAGES ON PT BANK NEGARA INDONESIA

The national shipping industry is very close and cannot be separated in relation to an aspect of financing. Financing for the procurement of these ships can be obtained through credit or loan facilities. Because the credit facilities provided by banks carry risks, in its implementation, banks must observe sound credit principles, confidentiality principles, trust principles and prudential principles. Thus, before distributing credit facilities, banks must try to reduce this risk by having confidence in the good faith, ability and ability of prospective debtors to pay off their obligations in paying off debts with guarantees.

This study aims to examine the regulation of marine vessels as objects of mortgage collateral in Indonesian legislation and to analyze the implementation of the use of the principle of prudence in providing credit with marine ship mortgage guarantees at PT. Bank Negara Indonesia.

The approach method used in this research is a social legal approach. The research specification used is descriptive analytical, and this research uses interviews and literature study methods. Interviews were conducted with Credit Analysts PT. Bank BNI Mojokerto City Regional Office, Relationship Manager of PT. Bank BNI Boyolali Regional Office ,. The data analysis method used is qualitative data analysis method of primary and secondary data.

The results of the research show that the provisions regarding or ships as objects of mortgage collateral can be found in the Civil Code (KUH Perdata), the Commercial Code (KUHD), Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, Regulations Government Number 51 of 2002 concerning Shipping, Presidential Regulation Number 44 of 2005 concerning Ratification of the International Convention on Maritime Liens and Mortgages. The application of the principle of prudence in providing credit with ship mortgage guarantees at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) analysis of financing is carried out by analyzing with the five c's guideline the debtor or prospective debtor and their business, according to the characteristics of the shipping business along with compliance with laws and regulations in the shipping sector. If there are obstacles when checking the regulations regarding the ship's mortgage, it is deemed that it does not provide legal certainty to the parties in the agreement, so the Government should conduct a review of the relevance of the regulation of Mortgages and Mortgages on Marine Ships in the Civil Code (KUH Perdata) and the Indonesian Code. Commercial Law Law (KUHD) in accordance with the times

Keywords: regulation, mortgage; guarantee; ship; the precautionary principle.